

## ABSTRAK

Keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan publik dapat dilihat dari kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan pendapatan daerah ke belanja modalnya dalam APBD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) terhadap Belanja Modal (BM).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan sampel Kabupaten/Kota yang telah melaporkan Laporan Realisasi APBD dengan lengkap dalam kurun waktu periode penelitian antara tahun 2007 - 2009. Jenis datanya adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda.

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, dan DBH Pajak secara simultan mempengaruhi variabel BM secara signifikan, dengan kontribusi 15,2% dan sisanya sebesar 84,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa DAU, dan DBH Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM; dan PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap BM.

Kata kunci: *Kepentingan publik, APBD, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak*